

PERSPEKTIF

Jakarta dalam Sejarah

OLEH HENDRA KURNIAWAN



“L enggang lenggok Jakarta, bagai pinggul gadis remaja, setiap pan-

dangan selalu menatap, penuh harapan untuk menjamah...” Tentu banyak yang telah akrab dengan lirik lagu *Lenggok Jakarta* yang dipopulerkan Andi Meriem Matalatta itu. Jakarta memang penuh pesona yang menggoda jutaan insan dari berbagai daerah untuk datang mengadu nasib.

Jakarta bukan hanya untuk mengais rezeki. Kelanjutan lirik lagu itu juga menggambarkan ibu kota menawarkan banyak mimpi. Surga dunia maupun neraka dunia, orang tinggal memilihnya. Akan tetapi di balik itu semua, Jakarta menyimpan mutiara masa lalu yang mampu membangkitkan romantika dan kesadaran sejarah.

Jakarta tahun ini berusia 488. Sejarah kotanya bermula dari sebuah bandar pelabuhan kecil di muara sungai Ciliwung bernama Sunda Kelapa yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang. Bandar lalu berkembang menjadi kota dagang yang semakin ramai. Para pedagang dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa berjumpa di tempat ini. Tak heran apabila penduduk Sunda Kelapa sangat beragam dan mengalami perpaduan berbagai budaya. Kenyataan akulturasi ini bisa dilihat dari budaya Betawi yang masih tetap lestari.

Sunda Kelapa merupakan bandar utama Kerajaan Sunda (Pajajaran) yang pusatnya ada di pedalaman, dekat Bogor sekarang. Sunda Kelapa ditaklukkan Fatahillah dari Kerajaan Demak dan namanya menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Kedatangan VOC menjelang akhir abad ke-16 mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Nama Batavia menjadi saksi perkembangan kota ini selama lebih dari tiga abad. Pada masa pendudukan Jepang, Batavia kembali disebut Jayakarta (Jakarta) sampai sekarang.

Kondisi alam Batavia yang penuh rawa mirip situasi di Belanda. Sejak abad ke-11, negara kincir angin menerapkan sistem reklamasi lahan melalui polder untuk menanggulangi banjir air pasang. Polder merupakan sistem tata air tertutup menggunakan tanggul, pompa, saluran air, kolam retensi, instalasi air kotor, dan pengaturan tata lahan. Sistem polder yang dinilai berhasil di Belanda ini, kemudian diterapkan pula di Batavia.

Pemerintah kolonial Belanda mem-

bangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Batavia dibangun dalam bentuk blok dengan benteng dan parit. Pada masa pemerintahan Daendels, didirikan pusat kota baru bernama Weltevreden dan Mesteer

Cornelis. Weltevreden merupakan kompleks pemerintahan, yang masih ada sampai sekarang, di sekitar Lapangan Merdeka. Sedangkan daerah Mesteer Cornelis sekarang disebut Jatinegara. Daerah ini awalnya milik Cornelis Chastelein yang di atasnya berdiri rumah-rumah peristirahatan (paviliun) orang-orang Eropa.

Kota Batavia tua merupakan tempat tinggal orang-orang Eropa, terutama Belanda. Sementara kaum pribumi, Tionghoa, dan suku bangsa lainnya disingkirkan ke tempat lain. Dalam pola tata kota,

nan tua telah menjelma menjadi monumen yang merekam jejak-jejak perjalanan bangsa. Apalagi sejak masih bernama Batavia, Jakarta menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, sampai sekarang. Tentu berbagai dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya telah mewarnai perjalanan sebagai sebuah kota. Jakarta, dari kota bandar berkembang menjadi metropolitan, bahkan kini megapolitan.

Kualitas kekonan yang ditawarkan bangunan-bangunan lama di kota tua memiliki potensi besar yang tidak sekadar kawasan wisata, namun juga sarat nilai sejarah. Keberadaan kota tua berperan penting membangkitkan kesadaran sejarah. Inilah bentuk pendidikan sejarah bagi masyarakat, pemerintahan, dan terlebih generasi muda. Belajar dari sejarah kota tua dapat

pelestarian bangunan-bangunan tua. Kerusuhan Mei 1998 sempat memperparah kehancuran bangunan-bangunan tua. Ditambah banyaknya kasus pelanggaran hukum terhadap perlindungan bangunan tua telah menghidupkan kembali semangat baru melestarikan kota tua.

Tahun 2000 pemerintah mulai merestorasi bangunan-bangunan teresisa. Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menerbitkan SK Gubernur Nomor 106/2001 yang berisi pelestarian kota tua untuk menarik minat wisatawan dan memunculkan kembali citra Jakarta sebagai kota bersejarah. Kota tua merupakan denyut nadi sejarah Jakarta, maka jangan sampai semakin mewahterasa mati dan kehilangan jiwanya. Upaya revitalisasi kota tua perlahan mulai menampakkan hasil tahun 2006.

Terakhir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2014 menghasilkan sebuah masterplan revitalisasi kota tua. Pengembangan model revitalisasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan disadari sangat diperlukan. Sebagai *urban heritage*, kawasan kota tua tidak hanya memberi warisan berupa bangunan-bangunan fisik. Kehidupan sosial masyarakat berikut kondisi dan penataan lingkungan tempat tinggal saat itu menjadi menarik untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut.

Berbagai komponen yang muncul sebagai bagian dari *re-enact* kehidupan masa lalu di kota tua perlu dihadirkan. Inilah yang akan mengkrystal sebagai nilai-nilai untuk dihidupi kembali. Pembangunan kota perlu belajar dari kebijakan-kebijakan di masa lampau yang memberi ruang hidup lebih manusiawi dan berdampingan dengan alam.

Pembangunan kanal-kanal, parit, selokan, saluran air yang baik dan teratur seperti pada masa Batavia tua dirancang untuk siap menghadapi banjir. Tentu ini jauh berbeda dibanding sekarang. Banyak peribangunan mengabaikan sanitasi dan ruang terbuka hijau. Keberadaan trem pada masa Batavia juga dapat menjadi tolok ukur perlunya pengadaan alat transportasi massal, selain Transjakarta.

Memang kini berbeda, namun konsep-konsep pembangunan kota peduli kehidupan patut dicontoh. Tak hanya indah dan nyaman untuk ditinggali, namun juga berwawasan lingkungan jauh ke depan. Kemampuan menghadirkan dan memprediksi suasana masa depan sangat penting agar tata kota bisa didesain siap menghadapi segala tantangan dan perubahan zaman. ■

Penulis Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma



« Banyak pembangunan mengabaikan sanitasi dan ruang terbuka hijau. Keberadaan trem pada masa Batavia juga dapat menjadi tolok ukur perlunya pengadaan alat transportasi massal, selain Transjakarta. »

tidak hanya di Batavia, Belanda menggunakan sistem *wijkensysteem* yakni pengelompokan tempat tinggal berdasarkan suku bangsa. Akibatnya di banyak daerah muncul kawasan Pecinani, Pekojan, Kauman, Keling, dan sebagainya yang masih dapat dilihat jejak-jejaknya.

Kota tua di Jakarta merupakan saksi bisu yang menyimpan kisah panjang berbagai kejadian masa lalu. Banyak bangu-

menjadi modal membangun Jakarta baru yang lebih nyaman dan layak huni.

Belajar

Upaya pelestarian kota tua sudah lama dilakukan. Pada tahun 1972, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan keputusan resmi menjadikan kawasan kota tua sebagai situs warisan. Tujuannya melindungi sejarah arsitektur kota dan

Dana Aspirasi

Joko Widodo menolak usulan program pembiayaan di daerah pemilihan atau dana aspirasi dalam DPR. Sikap tegas Presiden itu patut dilagukan saat ini beban yang ditanggung rakyat akibat gejolak perenominan global, sangat dibutuhkan harus dimanfaatkan seefektif kepentingan rakyat banyak.

apipurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR, tiga fraksi menolak pengesahan peraturan tentang cara pengusulan program pembangunan di daerah pemilihan atau dana aspirasi. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDI-P. Sementara itu, Fraksi PKS mendukung.

Keputusan rancangan peraturan tentang pembiayaan pembangunan di daerah pemilihan, anggota DPR segera akan membahas usulan program dari setiap daerah pemilihan. Usulan akan disetujui atau ditolak oleh pimpinan DPR.

Keputusan kementerian terkait akan membahas usulan. Kalau ada usulan yang tumpang tindih dengan Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja pemerintah 2016, hal itu dapat ditolak. Sebelum disahkan peraturan DPR tentang pembiayaan pembangunan di daerah pemilihan, penegasan akan menolak dana aspirasi itu. Keputusan DPR itu bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Pemerintahan. Karena itu wajar jika pemerintah menyetujui dana aspirasi. Dalam UU Sistem Pemerintahan ditetapkan bahwa kebijakan pembiayaan dari visi dan misi Presiden. Visi dan misi Presiden itulah yang kemudian dituangkan menjadi program pembangunan prioritas dengan melibatkan daerah dalam musyawarah rencana pembangunan.

Bila muncul usulan dari DPR RI dan usulan itu mengubah arah pembangunan, itu tidak sejalan dengan Undang-Undang. Usulan DPR tentang dana aspirasi itu juga tidak logis karena diusulkan tanpa dibuat perencanaan programnya terlebih dahulu. Sejatinya, rencana pembangunan selalu dimulai dengan penyusunan program pembangunan, lalu dilanjutkan penyusunan postur anggaran.

Selain itu, dana aspirasi sebesar 20 miliar rupiah untuk tiap daerah anggota DPR di tiap tahun itu sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo proporsinya berdasarkan daerah. Padahal, Presiden Jokowi telah menetapkan program pembangunan dilakukan di wilayah kabupaten, luar Jawa, daerah kepulauan, dan Indonesia.

Keputusan pengalokasian anggaran dengan jumlah untuk daerah pemilihan, konsekuensinya akan dikonsentrasikan di pulau Jawa, yang artinya banyak sekali. Itu artinya mengubah anggaran yang sudah ada. Keputusan ini tidak akan dapat menjadi instrumen